



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang belandaskan hukum, tidak hanya mensejahterakan rakyatnya, melainkan membentuk masyarakat Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pembentukan pemerintah tidak hanya menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, akantetapi harus melaksanakan pembangunan secara konseptual dan konsisten(Gaffar, 2004)

Dalam pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”

Maka dari itu Negara Indonesia terbagi dalam beberapa daerah otonom maupun daerah yang bersifat administrasi. Didalam pelaksanaan pemerintah daerah sebelum diberlakukannya UU no. 5 tahun 1974 yang mengatur asas dekonsentrasi hanya dianggap sebagai pelengkap terhadap asas desentralisasi (Gaffar, 2004)

Pelaksanaan pasal 18 UUD 1945 didukung dengan adanya UU no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Hal-hal yang menjadi landasan dalam Undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat,

menumbuhkan upaya kreatifitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi dewan perwakilan desa (DPD)(Nur, 2016)

Dalam perkembangannya tidak hanya pemerintah daerah sebagai penyelenggara kegiatan pemberdayaan, kreatif, serta pengembangan peran dan fungsi dewan perwakilan desa, akan tetapi desa memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Pemerintah desa juga merupakan pembina, pemberdaya, pelayan masyarakat yang sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat berpartisipasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Oleh karena itu untuk mendorong hal tersebut pemerintah daerah berkerjasama dengan seluruh elemen pemerintahan yang dinaunginya, termasuk pemerintah desa, dikarenakan untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan keikutsertaan masyarakat serta peran aktif dari masyarakat, khususnya masyarakat desa(Nur, 2016)

Dalam UU no.6 Tahun 2014 tentang desa, mendefinisikan desa adalah desa sebagai desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, seperti kepentingan masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lasut, 2015)

Maka dari itu desa dapat diartikan sebagai garda terdepan dari sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, dimana keberadaanya sebagai

ujung tombak dari melaksanakan kehidupan yang demokratis bagi masyarakat desa. Praktek pelaksanaan pemerintahan desa merupakan cermin dari bagaimana aturan demokrasi diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Dalam pasal 1 UU no. 6 tahun 2014 tentang desa, menjelaskan pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa(Lasut, 2015)

Desa atau sebutan lainnya seperti negeri, dusun, kampong dan lain sebagainya merupakan komunitas adat dan sebagai unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terendah, desa memiliki wewenang dalam membangun desa, memberdayakan masyarakat, dan membina masyarakat. Secara historis desa menjadi cikal bakal dari terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Oleh karena itu pemerintah desa merupakan organisasi pemerintahan yang terendah tingkatannya dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia. Supaya dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan teratur, tertib dan terorganisir maka dibutuhkan adanya pemerintahan, yang dalam hal ini adalah pemerintahan desa. Keberhasilan dalam membangun pemerintahan desa tidak terlepas dari adanya figure yaitu seorang kepala desa(Nuraini, 2010)

Kepala desa mempunyai dua fungsi utama dan kedudukan yaitu sebagai alat pemerintah dan sebagai alat desa. Sebagai alat pemerintah atau

aparatus pemerintah kepala desa harus menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Sedangkan sebagai alat desa, kepala desa memiliki tugas kepada seluruh warga masyarakatnya. Tidak hanya itu, kepala desa harus mampu menjadi contoh bagi aparatur desa yang lain serta harus mampu membimbing, mengatur dan mengarahkan masyarakatnya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang dapat menopang pembangunan di desa (Darujati, 2009)

Maka dari itu kepala desa merupakan pemimpin tertinggi ditingkat desa. Kepala desa dapat memberikan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan bersama sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan di desa benar-benar efektif, efisien, berhasil guna dan berdaya guna. Selain itu, keberhasilan dalam mewujudkan tujuan tersebut tidak terlepas dari adanya partisipasi politik masyarakat dalam memilih seorang pemimpin, dimana masyarakat sebagai kesatuan individu merupakan bagian yang integral dari sistem pemerintahan desa (Darujati, 2009)

Adanya peran aktif kepala desa dalam era pembangunan desa yang menjadi salah satu prioritas dari program pemerintah pusat dibawah kepemimpinan presiden Ir, H. Joko Widodo, dimana kepala desa harus mampu melaksanakan tugas serta kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, serta menjalankan, menyelenggarakan dan menjadi penanggung jawab penuh dibeberapa bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan kemasyarakatan dala rangka menyelenggarakan pemerintahan desa (Yudhanto, 2016)

Pemilihan kepala desa atau yang disingkat dengan (Pilkades) merupakan suatu pemilihan untuk mencari pemimpin yang dirasa layak memegang kekuasaan dan wewenang dalam membangun desa selama masa kepemimpinannya. Pemilihan kepala desa dapat diartikan juga sebagai bentuk kegiatan politik yang menarik bagi masyarakat desa yaitu sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian pemimpi atau keberlanjutan pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa, untuk mengangkat calon yang dirasa layak sebagai pemimpi atau kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan sebuah instrument dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis (Nur, 2016)

Penyelenggaraan pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan pemerintah tentang tata cara dalam penyelenggaraan pilkades. Sehingga semua tahapan-tahapannya yang dimulai dari pembentukan panitia pilkades sampai pada proses pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan rangkaian dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik karena perbedaan pilihan dan tetap mampu menjaga keutuhan masyarakat. Jika dilihat dalam konteks sejarahnya dari masa ke masa, dimana pada jaman Belanda pemilihan kepala desa menggunakan model paling sederhana yaitu dengan cara pemilihan terbuka. Masing-masing pemilih dan para pendukung calon membuat barisan di area terbuka, dan yang di nyatakan

menang sebagai kepala desa apabila mendapatkan barisan yang paling panjang (Alam, 2018)

Dalam perkembangan yang selanjutnya agar tidak terjadi konflik antara pendukung maka dilaksanakan pemilihan tertutup secara langsung. Setelah Negara Indonesia merdeka, pemilihan kepala desa mengalami peningkatan dalam pelaksanaannya yaitu dengan menggunakan pemilihan tertutup dan surat suara. Akan tetapi pada saat itu masih menggunakan gambar hasil bumi sebagai lambang dari para calon, hal itu dilakukan agar memudahkan pemilih untuk mengenal calon yang akan dipilih. Sementara di era reformasi, pemilihan kepala desa mengalami perkembangan yang cukup signifikan yaitu dengan menggunakan kertas suara serta foto dari para calon kepala desa, sehingga memudahkan pemilih untuk mengenali calon yang akan dipilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya harus mencoblos kertas suara yang disertai foto calon di bilik tertutup. Hasil perhitungan suara masih sama dengan pilkades sebelumnya yaitu calon yang memperoleh suara terbanyak adalah pemenangnya (Yudhanto, 2016)

Dalam perkembangan budaya politik relevansinya terhadap penyelenggaraan demokrasi di Indonesia yang mengkrucut pada pemilihan kepala daerah maupun pemilihan kepala desa yang dipayungi oleh otonomi daerah telah menjadi bahan kajian yang kompherensif terhadap aktor politik desa dan partisipasi politik masyarakat. Penyelenggaraan yang melibatkan warga masyarakat secara langsung sering kali menimbulkan proses politik yang cukup kompleks ditingkat pemerintahan desa. Keanekaragaman culture

yang ada dalam masyarakat sangat mempengaruhi proses demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Tatanan nilai adat istiadat, hubungan kekeluargaan, agama, maupun nilai-nilai lainnya, akan terlihat dalam tindakan politik masyarakat (Damsar, 2013)

Partisipasi politik masyarakat dalam proses politik dari skala nasional sampai skala terkecil seperti pemilihan kepala desa dari segi rekrutmen, sebagai landasan dalam konteks pemilihan kepala desa di desa Lubuk, pandangan politik maupun kepentingan masyarakat menjadi terbagi-bagi dengan membentuk kelompok masing-masing, yang penulis sebut sebagai kelompok kepentingan yang berlandaskan atas dasar kekeluargaan dan kekerabatan. Dalam artian bahwa partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat dalam pemilihan kepala desa dominan akan hubungan kekeluargaan (Habena, 2018)

Individu-individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik, pada dasarnya memiliki alasan yang menjadi landasan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, salah satunya adalah berlandaskan kesamaan ras dan kekeluargaan atau kekerabatan. Hal ini juga sesuai dengan tanggapan Huntington dalam Mufti 2012. Dimana landasan seseorang berpartisipasi politik karena adanya kesamaan ras, agama, atau karena strata sosial dan lain-lain. Partisipasi politik masyarakat yang demikian pada dasarnya lebih banyak menimbulkan perasaan dari individu-individu terhadap proses politik yang ada dengan hubungan emosional yang sangat kuat (Damsar, 2013)



Menurut Meriam Budiahardjo dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar ilmu politik (2013) mendefinisikan bahwa partisipasi politik dapat bersifat perorangan atau secara kelompok dalam organisasi atau secara spontan di topang atau secara sporadik, atau secara baik-baik, atau secara kekerasan legal atau illegal aktif atau tidak aktif. Sedangkan Ramlan Subakti dalam bukunya yang berjudul memahami ilmu politik (2010) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan, pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan (Budiardjo, 2016)

Partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sangatlah dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan demokratis, namun sering kali rendahnya tingkat partisipasi masyarakat menjadi masalah tersendiri yang terjadi dalam proses pemilihan kepala desa di banyak wilayah di Indonesia, disatu sisi masyarakat yang sangat apatis dan tidak peduli mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkades cenderung turun (Yuliani, 2017)

Rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa juga dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya pandangan bahwa tidak adanya calon yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin, dan fenomena rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa dapat menjadi masalah nasional, sehingga dalam penanganannya tidak diserahkan kepada salah satu pihak saja, melainkan dibutuhkan keikutsertaan komponen bangsa dalam menanganinya. Apatisnya

masyarakat inilah yang justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mendapatkan jabatan dan kekayaan ketika memegang kekuasaan di tingkat politik lokal ini(Yuliani, 2017)

Pemahaman masyarakat tentang demokrasi pada umumnya adalah masyarakat dapat ikut menentukan siapa yang memimpin mereka melalui pemilihan kepala desa, namun hal lain yang diungkapkan adalah adanya penilaian bahwa tidak adanya calon kepala desa yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik, dengan kalimat lain dapat dikatakan bahwa ketidak hadirannya masyarakat dalam pemilihan kepala desa bukan disebabkan oleh sistem pemilihan kepala desa yang tidak demokrasi(Gaffar, 2004)

Lokasi penelitian ini berada di desa Kanigoro, kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, dalam proses pemilihan kepala desa baru.Sesuai yang dikeluarkan oleh salah satu berita Gunung Kidul yaitu *Antara News*, menjelaskan bahwa desa Kanigoro adalah salah satu desa dari 30 desa yang mengikuti pilkades serentak di tahun 2018. Dalam artian desa Kanigoro sebelumnya telah melaksanakan proses pemilihan kepala desa pada 13 Oktober 2018 di balai desa Kanigoro

Berdasarkan informasi yang didapat peneliti saat melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di salah satu dusun yang ada di desa Kanigoro, dimana salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa bermacam-macam cara yang dilakukan para calon kepala desa guna menarik empati masyarakat Kanigoro untuk memilih mereka baik itu dilakukan saat kampanye maupun

sosialisasi. Selain melakukan kampanye, setiap calon melakukan sosialisasi kerumah-rumah warga untuk memperkenalkan diri mereka kepada warga dan memberikan janji-janji untuk desa kedepannya. Dan lebih menariknya lagi beberapa pemuda mengatakan bahwa mereka tidak ikut berpartisipasi dalam pilkades lantaran tidak adanya hubungan kekeluargaan, namun hal berbeda di sampaikan oleh seorang perangkat desa dimana mengatakan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di tahun 2018 sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan pandangan penulis dalam keterbatasan informasi, maka hal ini dikira perlu untuk digali lebih mendalam, sehingga mendapatkan kebenaran mengenai pemilihan kepala desa Kanigoro tahun 2018

Berdasarkan kondisi tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, Tahun 2018”

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat dan mempertimbangkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah supaya tidak terjadi pembahasan yang meluas yaitu: Bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, Tahun 2018?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian merupakan titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Penelitian akan berada pada arah koridor penelitian yang benar dengan mengacu pada tujuannya. Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, Tahun 2018.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan kegunaan secara praktis baik itu untuk peneliti sendiri ataupun orang lain dan khususnya pemerintah desa yang menjadi objek penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan di bidang ilmu politik, khususnya bagi masyarakat dan pemerintah desa, terutama sebagai pembelajaran dan informasi mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa Kanigoro, kecamatan Saptosari, Gunung Kidul tahun 2018.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan dalam proses pemilihan kepala desa, supaya merumuskan kebijakan yang lebih baik lagi terkait dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di seluruh Indonesia.

3. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi para pembaca terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Triwidyastuti dalam penelitiannya pada skripsi S1 ilmu pemerintahan UMY 2011 yang berjudul “partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kulon progo tahun 2011” menggunakan metode penelitian kualitatif pada penelitiannya dengan sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Sementara dalam teknik analisa data digunakan bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah kulon progo tahun 2011.

Heri Kusmanto pada jurnal penelitiannya yang berjudul peran badan permusyawaratan daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Menjelaskan fungsi pemerintah desa tidak hanya sebagai penyelenggara kegiatan pemerintahan, akan tetapi pemerintah desa juga dapat menjadi pembina, pengayom dan menyediakan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dengan sendirinya dapat menunjang dalam memberikan hak politik mereka pada saat proses politik desa diadakan.

Norman Nur Anisa pada skripsi S1 ilmu pemerintahan UMY 2010 yang berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa” menyatakan bahwa pembangunan desa sangat berpengaruh pada aspek partisipasi politik masyarakat desa karena dapat

menghindari kebijakan pembangunan desa yang sentralistik. Oleh sebab itu dalam proses pelaksanaan pembangunan diperlukannya partisipasi politik masyarakat desa yang aktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah dalam proses pembangunan desa dan yang dihadapi dengan alternative pemecahannya yang secara utuh dilakukan oleh masyarakat.

Janwandri dalam penelitiannya pada ejournal ilmu pemerintahan 2013 yang berjudul “proses pemilihan kepala desa di desa tanjung nanga kecamatan malinau selatan kabupaten malinau” menjelaskan bahwa proses pemilihan kepala desa tidak terlepas dari beberapa masalah, antara lain sumber daya manusia (SDM), waktu, dan dana. Masalah sumber daya manusia yang dimaksud adalah tidak adanya calon kepala desa dengan latar belakang pendidikan tinggi (sarjana) serta panitia pelaksanaan pemilihan juga berlatar belakang pendidikan rendah dan kuranya pemahaman masyarakat dalam hal partisipasi politik.

Sahela pada jurnal penelitiannya yang berjudul “pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa semangko kecamatan Marangkayu kabupaten Kutai Kartanegara” yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala desa dan mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam proses pemilihan kepala desa. Adapun teknis pengumpulan data dilakukan dengan penelitian pustaka dan penelitian lapangan seperti pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Sementara analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis data model interaktif.

Budy Setiawan dalam penelitiannya pada skripsi S1 ilmu pemerintahan UMY 2007 yang berjudul “partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di kabupaten Kotawaringin barat Kalimantan tengah 2005” menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan memberikan gambaran atau deskriptif terkait partisipasi politik masyarakat secara langsung dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini mendapatkan hasil dari keseluruhan variabel-variabel adalah sebesar 2,32 sehingga partisipasi politik masyarakat di kotawaringin barat dapat dikriteriakan sedang.

Eka purnawan pada jurnal penelitiannya yang berjudul “prilaku pemilih masyarakat di desa Toapaya utara kecamatan Toapaya kabupaten bintang dalam pemilihan kepala daerah tahun 2010. Menjelaskan bahwa pemilihan umum kepala daerah di kepulauan riau merupakan pemilihan langsung yang kedua kalinya bagi masyarakat kepulauan riau. Dalam penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan format deskriptif yaitu menggunakan skala gutman untuk menganalisa data. Skala ini digunakan untuk melihat kecendrungan perilaku pemilih masyarakat, apakah lebih dipengaruhi oleh faktor rasional, kritis, tradisional, dan skeptis. Penelitian ini mendapatkan hasil yang disimpulkan prilaku pemilih masyarakat pada pemilihan kepala daerah gubernur di desa topaya utara adalah pemilihan tradisional dengan alasan kesamaan etnis dan hubungan kekerabatan dengan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari pada partai, ideologi, visi-misi, rekam jejak maupun imbalan materi yang diberikan pasangan calon tertentu.

Theofilus Kuhon pada jurnal penelitiannya yang berjudul “partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa Tonselama kecamatan tondano utara. Menjelaskan bahwa demokrasi dapat di artikan sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat maka pilar dari demokrasi adalah partisipasi. Partisipasi masyarakat merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, namun rendahnya partisipasi masyarakat menjadi persoalan sampai sekarang. Partisipasi masyarakat merupakan satu syarat demi mewujudkan pemerintah yang demokratis, meskipun dalam bentuk-bentuk partisipasi dapat diekspresikan dengan berbagai macam, namun pada umumnya di Negara-negara yang menganut demokrasi ada anggapan bahwa lebih banyak partisipasi masarakat akan lebih baik, artinya semakin tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan ikut anding dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Arther Muhaling dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “partisipasi politik masyarakat dalam pemilikada di kecamatan Siau barat selatan kabupaten Sitaro” penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik dari Ramlan Surbakti, adapun metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan lokasi penelitian di kecamatan sibarsel kabupaten Sitaro yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi dengan informan yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian ini menyatakan partisipasi politik masyarakat di kecamatan Sibarsel cukup tinggi. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat didukung oleh berbagai hal,



antusiasme yang tinggi tentang motivasi dan dukungan untuk mencapai cukup tinggi, peran media massa sangat strategi dalam mendorong pengetahuan masyarakat terhadap proses pemilihan umum sebagai sarana sosialisasi politik. Kemudian didukung dengan kinerja KPUD yang cukup maksimal dalam melakukan kampanye agar dalam mendorong minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Agustinus Lefmanut dan Sigit Widiarto dalam penelitiannya pada jurnal internasional yang berjudul “partisipasi masyarakat desa langgur kecamatan kei kecil kabupaten maluku tenggara dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2013. Menjelaskan pemilihan kepala daerah sudah di atur dalam amandemen konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 meletakkan dasar negara dan kedaulatan di tangan rakyat yang terwujud melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan wilayah sistem pemerintahan ke arah yang lebih demokratis. Dimana dalam penelitiannya mengatakan bahwa partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan kepala daerah langgur pada 2013 bisa dikatakan sangat tinggi. Ini bisa diukur dengan partisipasi atau antusias warga desa langgur melalui kegiatan pemilihan kepala daerah seperti pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan kampanye dari masing-masing kandidat.

Windy Lovelia Kumendong, Johannis Kaawoan, Frangky Rengkung dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Partisipasi masyarakat desa Liba dalam pemilihan kepala desa. Mendefinisikan partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam proses politik, dikarenakan

dalam Negara yang menganut sistem demokrasi masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan umum. Partisipasi politik masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, salah satunya dalam hal memilih pemimpin pemerintahan, termasuk pemilihan kepala desa. Dalam penelitian ini menjelaskan juga bahwa secara umum rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja kepala desa, hal ini disebabkan tingkah dan perilaku pemimpin mereka tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat menganggap pemerintah desa tidak dapat memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan mereka.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian ini merupakan kajian analisis mengenai tema-tema yang diteliti. Kajian penelitian menjadi bagian yang sangat penting karena menganut landasan berpikir atau titik tolak didalam penelitian. Kerangka teori juga dapat menjadi referensi bagi peneliti terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Oleh karena itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan diri dari sudut mana masalah penelitian ini ditelaah.

John W. Best mendefinisikan teori pada dasarnya berisi gambaran masalah, hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel. Suatu teori yang didalam dirinya terkandung keunggulan untuk bisa menjelaskan suatu gejala dan suatu teori juga berkekuatan untuk memprediksi suatu gejala. Lebih

lanjutnya John Dewey mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih praktis dari pada suatu teori yang hebat, metode ilmiah bertujuan untuk melahirkan teori-teori atau generalisasi-generalisasi. Dari teori-teori yang ditentukan bisa dijadikan dasar prediksi dalam mengantisipasi kejadian-kejadian menantang secara lebih tepat. Berikut ini akan di jabarkan beberapa teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini:

### **1. Partisipasi**

Secara etimologi konsep dasar partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa Inggris yaitu *part* yang berarti bagian. Jika kata *part* menjadi kata kerja maka kata ini menjadi *to participate* yang berarti turut ambil bagian.

Partisipasi merupakan kegiatan yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam sebuah kebijakan dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Herbe Meclosky mengutip dari buku dasar-dasar ilmu politik Meriam Budiaharjo (2013), mendefinisikan partisipasi sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui pengambilan keputusan atau ikut ambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum.

Damsar (2013) mendefinisikan partisipasi sebagai peranan atau ikut serta dalam kegiatan politik, dan definisi seperti inilah mudah dipahami secara umum oleh masyarakat Indonesia. Setiap kegiatan publik, baik yang memiliki unsur politik maupun nonpolitik, dapat terlaksana dengan baik karna adanya

peran serta keikutsertaan masyarakat. Dalam segala kegiatan pemilihan umum seperti pemilihan presiden, legislatif, kepala daerah dan kepala desa di Indonesia, masyarakat mendekorasi tempat pemungutan suara sedemikian rupa supaya masyarakat tertarik untuk datang berpartisipasi ke tempat pemungutan suara dan menentukan pemimpin atau wakil pilihannya. Jadi menurut Damsar (2013) kegiatan-kegiatan yang seperti inilah yang dapat didefinisikan sebagai partisipasi.

Kemudian Huntington dan Nelson mengutip dalam Damsar (2013) membagi partisipasi menjadi dua bagian yaitu partisipasi yang otonom dan partisipasi yang dimobilisasi. Yang dimaksud dengan partisipasi otonom adalah partisipasi yang berdasarkan pada kemauan seseorang tanpa adanya dorongan atau paksaan dari orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan partisipasi yang dimobilisasi merupakan partisipasi yang bersifat digerakan oleh orang lain bukan berdasarkan kemauan atau kesadaran sendiri. Misalnya dalam proses pemilihan umum seseorang mau memilih calon tertentu karena adanya dorongan dari suatu pihak atau kelompok tertentu dan tidak atas kemauan dirinya sendiri.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam memberikan keputusan politik dan kegiatannya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik itu sendiri atau dengan berkelompok dan partisipasi dapat dilakukan dengan jalan apapun baik secara damai atau secara kekerasan dan anarkis. Dengan kata lain jika seseorang ingin mendapatkan

kekuasaan atau ingin menguasai panggung politik maka dia dapat melakukannya dengan berbagai macam cara walaupun dengan cara kekerasan dan cara yang illegal.

## **2. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat di setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang bersifat aktif maupun pasif dan sifatnya langsung maupun tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah, salah satu yang ingin dicapai dalam hal partisipasi politik adalah meningkatkan kemampuan setiap individu masyarakat dalam memahami politik.

Damsar (2013) menjelaskan pengertian partisipasi politik dapat dipahami melalui pengertian gabungan dari dua konsep yaitu bermakna partisipasi dan politik. Maka dari itu partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai turut ambil bagian, ikut serta atau berperan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintah, Negara, konflik dan resolusi konflik, kebijakan, pengambilan keputusan, pembagian dan alokasi.

Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam Damsar (2013) menjelaskan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan warga masyarakat yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang bermaksud untuk

mempengaruhi proses pembuatan keputusan serta kebijakan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Lebih lanjutnya Ramlan Surbakti (2010) menjelaskan partisipasi politik merupakan kegiatan masyarakat dalam mempengaruhi pelaksanaan dan pembuatan kebijakan umum dan ikut ambil bagian dalam memilih pemimpin atau wakilnya. Menurut Miriam Budiarjo (2013) mendefinisikan partisipasi politik secara general yaitu kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan berpartisipasi dalam memilih pemimpin. Kegiatan ini berupa memberikan hak suara dalam pemilihan umum, dan menghadiri setiap kegiatan yang berkaitan dengan penentuan keputusan.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokrasi. Hal ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik di Negara Indonesia bahkan diharapkan mulai dari masyarakat perdesaan. Karena didalamnya terdapat hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan, salah satunya adalah proses pemilihan pemimpin Negara, daerah dan desa dilakukan secara langsung.

Pemerintah dalam membuat dan mengeluarkan kebijakan politik dapat mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Hal ini yang mengharuskan

warga masyarakat agar ikut ambil bagian dalam setiap penentuan kebijakan politik, untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan pribadi maupun kelompoknya. Keikutsertaan ini dilakukan dengan cara berinteraksi dengan pemerintah, ikut ambil bagian dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, dan terlibat dalam memilih pemimpin dalam pemilihan umum. Keikutsertaan atau partisipasi ini dilakukan secara sukarela atas kesadaran, artinya setiap individu harus menyadari peranan mereka dalam memberikan kontribusi sebagai warga Negara.

Karena keputusan politik dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga masyarakat, dan warga masyarakatlah yang berhak ikut serta untuk menentukan keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga masyarakat dalam menentukan keputusan yang menyangkut atau mempengaruhinya.

Segala keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, untuk itu warga masyarakat berhak mempengaruhi keputusan politik melalui partisipasi dalam pemilihan umum untuk membuat dan memperjuangkan suatu kebijakan demi kesejahteraan masyarakat. Keikutsertaan warga masyarakat dalam pemilu merupakan elemen dasar dari sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi. Karena salah satu sifat dasar dari Negara demokrasi adalah adanya kompetisi secara bebas diantara para elit politik dapat

memperebutkandukungan dari warga masyarakat dalam rangka meduduki jabatan publik seperti presiden, anggota perwakilan rakyat dan kepala desa.

Suatu ukuran tingkat kesuksesan Negara berdemokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pemilihan umum. Karena dengan melakukan pemilihan umum masyarakat dapat memilih pemimpin-pemimpin dan wakil mereka yang bekompetensi dan menentukan yang mana serta yang layak memimpin mereka dan yang layak menjadi wakil mereka yang bisa menjalankan atau mengontrol jalanya roda pemerintahan untuk kedepanya.

Secara substansi makna yang terkandung dalam partisipasi adalah *voice*, akses atau kontrol warga masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan yang dapat mempengaruhi dirinya sehari-hari. *Voice* merupakan hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, gagasan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun pemerintah. Sedangkan akses berarti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena *governance* yakni mempengaruhi mempengaruhi dan menentukan arah kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Sementara kontrol warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses politik yang berkaitan dengan pemerintah.

Dalam partisipasi masyarakat diharapkan tidak hanya sebatas memberikan haknya dalam proses pemilihan akan tetapi harus ikut melakukan kontrol terhadap pemerintah, dan untuk melakukan kontrol masyarakat memerlukan akses yang dapat menghubungkan masyarakat



dengan pemerintahan. Pemerintah seharusnya lebih banyak menyediakan fasilitas atau akses agar masyarakat terhubung dengan pemerintah.

Partisipasi politik memiliki banyak bentuk dan dimensi, dalam penelitian ini hanya difokuskan pada partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pemimpin politiknya dan dalam hal ini memilih kepala desa yang akan duduk sebagai perwakilan mereka dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. Seperti yang dikatakan dalam Mujani (2012) tentang dimensi-dimensi partisipasi bahwa diantaranya dimensi itu adalah ikut pemilihan umum dan ikut dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah pemilihan umum.

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik**

Partisipasi sebagai suatu aktivitas warga masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pemilihan tertentu dan memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya. Berikut ini beberapa pendapat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.

Frank Lindenfeld dalam Ramlan Subarki (2010) mengatakan bahwa faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya Frank menemukan bahwa status ekonomi yang rendah dapat menyebabkan seseorang merasa tereliminasi dari kehidupan politik dan orang yang bersangkutan akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki keamanan ekonomi.

Ramlan Subarki (2010) menyatakan ada beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat, yaitu:

1. Kesadaran politik. Yang dimaksud dengan kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara, baik itu hak politik untuk memilih, hak ekonomi, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban dalam segala urusan politik.
2. Kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan penilaian masyarakat kepada pemerintah. Apakah masyarakat menilai pemerintah dapat dipercaya dan dipengaruhi atau tidak.

Apabila masyarakat sadar dengan kewajibannya sebagai warga Negara dan memiliki kepercayaan tinggi terhadap pemerintah, maka partisipasi politik akan mengikat, sebaliknya apabila kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah rendah maka keterlibatan masyarakat dalam proses politik terutama pada saat pemilihan umum cenderung menurun.

Menurut Morris Rosenberg (1945) dalam Damsar (2010) mengatakan ada tiga alasan utama kenapa orang bersifat apatis dalam aktifitas politik. Pertama, aktifitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek kehidupan. Setiap keputusan yang dikeluarkan pasti ada biaya atau resikonya. Oleh sebab itu, jika seseorang menganggap bahwa keterlibatan dalam aktifitas politik dapat mendatangkan resiko bagi berbagai aspek

kehidupannya, maka apatis merupakan pilihan terbaik bagi dirinya. Kedua, aktivitas politik dipandang sebagai suatu kejaan yang sia-sia. Ketiga, ketiada faktor untuk mengacu diri untuk bertindak atau disebut juga sebagai perangsang politik.

Miriam Budiarto (2008) mengatakan dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik masyarakat merupakan tolak ukur akan keberhasilan sistem politiknya, dalam artian semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat maka dianggap berhasil sistem politiknya, akan tetapi sebaliknya jika partisipasi politik masyarakat rendah maka di katakan sistem politiknya tidak baik, hal ini disebabkan oleh masyarakat yang tidak memiliki sifat dan perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Lebih lanjutnya Miriam Budiarto (2008) menjelaskan bahwa partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, status dan pendapatan atau dalam hal lain orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi, memiliki status sosial yang baik serta pendapatan yang memadai cenderung tinggi tingkat partisipasinya dari pada orang yang berlatar belakang pendidikan rendah dan berpendapatan rendah.

Dalam konteks Negara berkembang seperti Indonesia faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik lebih bervariasi, terkadang dalam tingkat partisipasi faktor ideologis yang lebih dominan. Namun secara umumnya Miriam Budiarto mengatakan partisipasi politik seseorang atau kelompok dipengaruhi oleh:

1. Tingkat Pendidikan

2. Individu kekeluargaan
3. Status sosial
4. Situasi dan Lingkungan

#### **4. Pemilihan Kepala Desa**

Dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, pemilihan kepala desa termaksud dalam lingkup proses pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam sejarah transisi bangsa ini menuju demokrasi, dimana pemilihan umum menjadi pilar bagi warga Negara dalam memberikan hak suara untuk memilih pemimpin pemerintahan. Pemilihan kepala desa selain sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat, juga pelaksanaannya harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Akan tetapi melalui revisi UU no. 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana pemerintah desa diatur melalui Undang-Undang tentang desa sendiri.

Selama ini proses pemilihan kepala desa selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik bagi masyarakat perdesaaan, bahkan tidak sedikit masyarakat yang memperdebatkan proses pemilihan kepala desa. Hal seperti ini disebabkan karena proses pemilihan kepala desa menjadi aktifitas dari bagaimana demokrasi diimplementasikan di desa. Dalam pandangan lain pemilihan kepala desa merupakan sarana pergantian pemimpin atau keberlanjutan pemerintahan di tingkat lokal.

Terry Christensen (1995) mengatakan bahwa secara finisi, politik lokal yang terjadi di desa akan menekankan pada pengambilan keputusan, memberikan hak suara, dan kebijakan yang dilaksanakan di tingkat lokal

ketika seorang individu atau sekelompok orang dapat terlibat dan mempengaruhi keputusan secara langsung.

Secara *history* desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum Negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang memiliki posisi yang sangat penting. Menurut UU no. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya terdapat sekelompok masyarakat yang bertempat tinggal, berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa atau yang dengan kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di desa. Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Desa dan pemerintahan desa merupakan 2 hal penting yang tidak dapat terpisahkan dalam menentukan arah kemajuan desa itu sendiri, maka dari itu dibutuhkan pemerintah desa yang baik, jujur, serta transparan untuk menjalankan pemerintahan desa. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan kepala desa dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pilkades.

Pemilihan kepala desa tentunya tidak terlepas dari tahapan dan proses yang dilalui, mulai dari pembentukan panitia, proses pencalonan, pemilihan, sampai pada hari perhitungan dan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak. Dalam perkembangannya dari masa ke masa, dimana pemilihan kepala desa pada jaman dulu menggunakan model paling sederhana yaitu dengan pemilihan terbuka. Akan tetapi dalam perkembangannya setelah kemerdekaan pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung, tertutup dan menggunakan kertas surat suara, guna menghindari konflik antara pendukung. Secara teknisnya bentukpartisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini,yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan panitia pilkades

Panitia pemilihan kepala desa harus menetapkan pembagian tugas kerja kepada semua anggota sesuai dengan posisi dan jabatan.Oleh sebab itu panitia pemilihan harus mencatat terlebih dahulu tugas-tugas yang ada dan harus dibagi kepada masing-

masing anggota sesuai dengan posisi dan jabatan dalam panitia pemilihan.

Panitia pemilihan kepala desa harus mempunyai kewenangan yang jelas sehingga masing-masing mengetahui siapa yang menjadi anggota pemerintah dan siapa yang harus melaksanakan perintah serta mempertanggungjawabkan siapa harus melakukan apa. Secara singkat panitia pemilihan kepala desa harus memiliki struktur kepanitiaan. Ketua adalah pimpinan tertinggi dalam panitia pemilihan, artinya segala tindakan atau keputusan yang dilakukan atas perintah, petunjuk dan sepengetahuan ketua. Kewenangan yang dimiliki ketua sangat luas karena melingkupi seluruh proses pemilihan kepala desa sedangkan wakil ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan oleh ketua panitia.

## 2. Partisipasi masyarakat dalam kampanye

Setelah proses pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terlaksana, panitia pilkades memberikan kesempatan kepada masing-masing calon kepala desa untuk melakukan kampanye. Kampanye adalah proses awal yang penting bagi masing-masing calon kepala desa, dikarenakan kampanye politik merupakan sebuah upaya yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemilih. Dalam Peraturan

daerah menyampaikan kampanye dilakukan 3 hari sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal.

Kampanye yang dimaksud adalah penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon kepala desa yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai kepala desa dan sesuai dengan jadwal yang diatur oleh panitia penyelenggara. Kemudian setelah masuk masa tenang, setiap calon kepala desa dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu.

### 3. Partisipasi masyarakat dalam pemungutan dan perhitungan suara

Terhitung 7 hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pilkades memberitahukan kepada masyarakat tentang dilaksanakannya pemilihan kepala desa dan mengumumkan secara terbuka nama-nama calon yang berhak dipilih, dan daftar pemilihan yang sudah terdaftar di panitia pemilihan. Selanjutnya 2 hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara surat memuat tentang hari, tanggal, jam dan tempat pemungutan suara harus sudah diterima oleh pemilih. Adapun surat undangan diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilihan yang diserahkan. Untuk membuktikan surat undangan yang dibawah pemilih pada saat akan menggunakan hak pilihnya, panitia akan mencocokkan



nama dari para calon dengan KTP atau bukti identitas lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

#### **G. Definisi konseptual**

1. Partisipasi Politik merupakan keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
2. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, tinggal bersama, dan terikat oleh keragaman budaya yang mereka anggap sama.
3. Pemilihan kepala desa merupakan suatu praktek politik lokal yang menjadi peristiwa penting yang hampir seluruh warga desa hadir untuk memilih kepala desa.

#### **H. Definisi operasional**

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberikan batasan tertentu untuk memberitahukan variabel dalam mencapai tujuan penelitian. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa Kanigoro kecamatan Saptosari, Gunung Kidul pada tahun 2018.

1. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa:
  - a. Pra pemilihan
    1. Aktifitas masyarakat dalam pembentukan panitia pilkades
    2. Aktivitas masyarakat dalam mengikuti kampanye
  - b. Hari pemilihan
    1. Aktivitas masyarakat dalam menggunakan hak pilih
  - c. Pasca pemilihan

1. Aktivitas masyarakat dalam mengikuti perkembangan dan proses perhitungan suara
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa menurut Ramlan Surbakti dan Miriam Budiarjo yaitu:
  1. Faktor kesadaran politik
  2. Faktor individu kekeluargaan

## **I. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moleong 2014), mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan dalam peristilahannya.

Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Dalam penelitian semacam itu peneliti

mencoba menentukan sifat situasi sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan.

Moleong (2014), mengatakan laporan penelitian deskriptif kualitatif akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berisi dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

## **2. Unit analisis**

Analisis data merupakan suatu cara pengelolaan data yang telah penulis peroleh selama melakukan penelitian dilapangan. Pengelolaan yang dimaksud yaitu untuk membuktikan keterangan empiris yang dikemukakan oleh penulis. Dalam penelitian ini, meniti beratkan pada bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kanigoro, kecamatan Saptosari, Gunung Kidul.

### **A. Deskripsi Informan**

Informan dalam penelitian ini yang telah dilakukan wawancara secara mendalam untuk mendapatkan informasi terkait dengan permasalahan yang di angkat, adapun narasumber yang di wawancara sebanyak 10 orang. Deskripsi informan dalam penelitian ini dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan dan jabatan. Adapun deskripsi informan tersebut sebagai berikut:

Tabel1 Deskripsi informan berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase %
1.	Laki-Laki	10	100%
2.	Perempuan	0	0%
Jumlah		10	100%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah informan dalam penelitian ini di dominasi oleh informan yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 10 orang (100%) sedangkan perempuan yakni 0 orang (0%).

Tabel 1.1 Deskripsi informan berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah	Presentase
1.	25-30	2	20%
2.	30-40	2	20%
3.	40-50	6	60%
4.	51 Keatas	-	
Jumlah		10	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini paling banyak berada pada usia 40-50 yakni 6 orang (60%) dan pada usia 25-30 dan 30-40 nilai rata-

ratanya sama yakni 2 orang (20%). Ini menunjukkan kematangan usia informan didalam memberikan pernyataan-pernyataan sehingga memperoleh informan yang akurat terkait dengan fokus penelitian.

Tabel 1.2 Deskripsi informan berdasarkan pendidikan terakhir

No.	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SLPA/SMA	4	40%
2.	SLTP/SMP	4	40%
3.	SD	1	10%
4.	Paket C	1	10%
Jumlah		10	100

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata informan berpendidikan mayoritas lulusan SLTA dan SLTP yakni sebesar 40% dibandingkan dengan lulusan SD dan Paket C sebanyak 10%.

Tabel 1.3 Deskripsi informan berdasarkan pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase %
1.	Perangkat Desa	3	30%
2.	Nelayan	3	30%
3.	Petani	1	10%

4.	Buruh	2	20%
5	Pedagang	1	10%
Jumlah		10	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pekerjaan dari informan yang dilakukan wawancara dalam penelitian ini paling banyak berasal dari kalangan perangkat desa dan nelayan dengan jumlah presentase masing-masing 30%, sedangkan paling sedikit berasal dari petani dan pedagang dengan jumlah presentasinya 10%

Tabel 1.4 Deskripsi informan berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Presentase %
1.	Dukuh	1	10%
2.	Karang Taruna	2	20%
3.	Tokoh Masyarakat	4	40%
4.	Masyarakat Umum	2	20%
Jumlah		10	100

Dari table di atas informan yang berdasarkan kedudukan atau jabatan disesuaikan dengan kebutuhan didalam pelaksanaan penelitian yang nantinya dapat memberikan informan yang akurat sesuai dengan fokus dalam penelitian

**a. Subyek penelitian.**

Dalam penelitian ini yang akan menjadi subyek penelitian adalah masyarakat umur 17 tahun keatas yang berada di desa Kanigoro dan sudah pernah mengikuti pemilihan kepala desa. Maka dapat dijelaskan yang dapat menjadi informan di dalam penelitian ini adalah perangkat desa, panitia pemilihan pilkades, tokoh masyarakat dan masyarakat desa Kaningoro, kecamatan Saptosari, Gunung Kidul.

**b. Obyek penelitian**

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa Kanigoro tahun 2018.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Observasi**

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama obyek yang diselidikinya. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.

Menurut Selltiz (Bugin, 2013) yang dimaksud dengan obsevasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Di jaman yang modern ini komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, bisa lewat telepon, sms, Email dan lain sebagainya, namun dalam penelitian ini yang akan dilakukan adalah wawancara langsung dengan infolmal yang sudah di tetukan. Dengan berdialog langsung dengan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih pemilihan kepala desa diharapkan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan masalah penelitian.

Dalam menentukan informan penelitian ini menggunakan teori Moleong yaitu *purposive*, dimana peneliti memilih informan yang kredibel untuk menjawab masalah sesuai dengan topik penelitian. Dengan demikian data yang diberikan oleh informan adalah data yang benar sesuai dengan realitas atau keadaan yang terjadi. Sehingga pada saat analisis akan mendapatkan hasil yang baik dan sesuai.



Tabel 1.5 Pertanyaan wawancara

No	Informan	Indikator	Pertanyaan
1	Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat.	1. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan panitia pilkades	<p>1. Apakah saudara pernah terlibat dalam pembentukan panitia pilkades?</p> <p>2. Apakah saudara tau syarat-syarat menjadi anggota panitia pilkades?</p> <p>3. Sebagai masyarakat apa pendapat bapak tentang anggota panitia pilkades tahun 2018 cukup memuaskan? atau tidak? Berikan alasannya.</p> <p>4. Apakah panitia pernah sosialisasi masalah pilkades kepada masyarakat?</p>

		<p>2. Partisipasi masyarakat dalam kampanye</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah saudara hadir pada saat kampanye? Coba di jelaskan</li> <li>2. Bagaimana dengan materi yang di sampaikan pada saat kampanye?</li> <li>3. Apa yang anda ketahui tentang kampanye?</li> <li>4. Apakah anda mengetahui tujuan kampanye?</li> <li>5. Menurut anda perlukah di adakan kampanye?</li> <li>6. Apakah anda mengajak masyarakat lainya untuk mengikuti kampanye?</li> <li>7. Apakah kampanye</li> </ol>
--	--	---	---

			dapat mempengaruhi pilihan anda pada pemungutan suara?
		3. Partisipasi masyarakat saat pemungutan suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pada saat pemungutan suara Pilkades anda menggunakan hak pilih? Coba di jelaskan</li> <li>2. Apa yang menjadi pertimbangan anda ketika memilih calon kepala desa?</li> <li>3. Apakah anda tau apa itu golongan putih (golput)?</li> <li>4. Bagaimana tanggapan anda tentang golput?</li> </ol>
		4. Partisipasi masyarakat dalam	1. Apakah anda ikut terlibat dalam penghitungan suara?

		<p>perhitungan suara</p>	<p>2. Seperti apa keterlibatan anda dalam penghitungan suara?</p> <p>3. Apakah anda menjadi tim penghitung salah satu calon atau saksi dari salah satu calon?</p> <p>4. Apakah pada saat penghitungan suara ada indikasi kecurangan yang dilakukan?</p>
		<p>5. Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat</p>	<p>1. Faktor apa yang mendorong anda untuk terlibat dalam proses pemilihan kepala desa tahun ini?</p>

		dalam pemilihan Kepala Desa	<p>2. Faktor apa menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan kepala desa tahun 2018?</p> <p>3. Apakah anda pernah berdiskusikan masalah pemilu dengan teman-teman? Kalau ada berikan penjelasannya.</p>
2	Ketua panitia Pilkades		<p>1. Ada berapa jumlah TPS disetiap pedukuhan?</p> <p>2. Apakah dalam pemilihan kepala desa panitia melakukan sosialisasi kepada</p>

			<p>masyarakat? Dan seperti apa sosialisasinya?</p> <p>3. Upayah-upayah apa saja yang dilakukan panitia pemilihan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?</p> <p>4. Apa hambatan yang di alami panitia pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala desa?</p> <p>5. Apa saja faktor penghambat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa tahun 2018?</p> <p>6. Ada berapa jumlah pemilih yang golput</p>
--	--	--	---

			<p>dan suara batal dalam pemilihan Kepala Desa?</p> <p>7. Bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2018?</p>
--	--	--	---

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti berbentuk surat-surat laporan, foto, dan sebagainya. Dokumen dibagi atas dua dokumen yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi.

#### 1. Dokumen pribadi

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Terhadap tiga macam dokumen pribadi yaitu: buku harian, surat pribadi, dan autobiografi.

## 2. Dokumen resmi

Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Termasuk didalamnya risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, dan sebagainya. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, bulletin, pernyataan dan berita yang disiarkan kepada media masa.

Tabel 1.6 Dokumen

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Sumber Dokumen
1	Dokumen resmi	Monografi desa	Pemerintah desa
2	Dokumen resmi	Data pemerintah desa	Pemerintah desa
3	Dokumen pribadi	Gambar desa	Pribadi
4	Dokumen resmi	Gambar pilkades	Pemerintah desa
5	Dokumen resmi	Laporan rapat	Pemerintah desa
6	Dokumen resmi	Berita acara hasil pilkades	Pemerintah desa
7	Dokumen pribadi	Buku catatan	Pribadi



#### **4. Teknik analisa data**

Menurut Patton dalam Moleong (2014) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan saluran uraian dasar yang membedakan dengan penafsiran, yaitu memberika arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

Moleong (2014), mendefinisikan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Selanjutnya moleong mengatakan bahwa proses analisis data kualitatif berlangsung melalui tahap-tahap yang dimulai dengan telaan atas jumlah yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, kuisisioner, observasi, foto, dokumen dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan teori Moleong (2014), maka proses analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dimulai dengan: pertama, menelaan data yang berasal dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto dan sebagainya. Kedua, data yang sudah ada direduksi dengan jalan membuat abstraksi, yaitu merupakan suatu usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Ketiga, menyusun satuan-satuan yang kemudia dikategorisasikan

dalam bentuk koding yang diakhiri dengan pemeringksaan keabsahan data. Keempat, setelah tahapan tersebut selesai dikerjakan, kemudia dialukan penafsiran data pada deskriptif analisis yaitu dengan cara merangsang secara terorganisir dari kategori yang ditemukan dan menghubungkannya dengan data yang baru muncul sehingga deskripsinya tercapai. Kelima, proses analisis data untuk mendapatkan kesimpulan akhir